

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Roni (2005), *Studi Pemberian Hak Atas Tanah Di Atas Tanah Sultan Grond Di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi D IV STPN, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Adhie, Brahmana dan Hasan Basri Nata Menggala (2002), *Reformasi Pertanahan. Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya*. Mandar Maju, Bandung.
- Ashari, Masyud (2008), *Status Tanah-Tanah Kesultanan Ternate Di Provinsi Maluku Utara (Tinjauan Juridis Hukum Tanah Nasional)*, Laporan Penelitian. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Astuti, Yuli (2000), *Administrasi Pertanahan Di Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi D IV STPN, Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Butt, Peter (1996) *Land Law*, Edisi Ketiga, Penerbit LBC Information Services, Sydney.
- Gautama, Sudargo dan Ellyda T. Soetianto (1996). *Komentar atas Peraturan-peraturan Pelaksanaan Undang-undang pokok Agraria*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harsono, Boedi (2003), *Hukum Agraria Indonesia. sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I, Djembatan, Jakarta.
- Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY (1994), *Sejarah Perkembangan Administrasi Pertanahan di Propinsi DI Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Kristiyani dkk. (1981) *Himpunan Peraturan-Peraturan Daerah Dll Perilahal Tanah yang Masih Berlaku Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno (1987). *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin, H., dkk (2007) *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung.
- Ni' matul Huda (2000), *Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam Jurnal Hukum UII, No.13, Vol. 7, April.

- Poerwokoesoemo, Soedarisman, KPH (1984) *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pramulianto, Sigit (2000), *Eksistensi Sultan Grond di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, Skripsi D IV STPN Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Riksblad Nomor 16 Tahun 1918 (1918), *Turunan Rijkshlad van Djogjakarta (Turunan Layang Undang-Undang Kasultanan)*, Yogyakarta.
- Roll, Werner (1983), *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta-Jateng*, Rajawali, Jakarta.
- Sapari, Sumber (1995), *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarjita, (2005) *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (1995), *Metode penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Sitorus, Oloan (2004) *Kapita Selekt Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnonongsih (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Soehino, (2002) *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*, Cetakan Kcenam, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo (1985) *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. (2006) *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Soeprapto, R (1986) *Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek*, di cetak oleh Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sunggono, Bambang (1994), *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika Jakarta.
- Sutedi, Adrian (2006), *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, BP. Cipta Jaya, Jakarta.

- Sutoprawiro, Koerniatmanto (1994) *Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia Asal Usul dan Perkembangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Thontowi, Jawahir (2007) *Apa Istimewanya Yogya?*, Pustaka Fahima, Yogyakarta.
- Utrecht, E. (1966) *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesembilan, PT. Penerbit "Universitas". Jakarta.
- Widjaya, A.W. (1993), *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1979*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Budi (2007). *Kebijakan Publik, Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang pemberlakuan sepenuhnya Hukum Tanah Nasional (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1954 Tentang Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai Pemilikan Hak Andarbe Dari Kelurahan Dan Hak Anggango Turun Temurun Atas Tanah.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1945 Tentang Peralihan Hak Milik Perorangan Turun Temurun Atas Tanah.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1945 Tentang Tanda Sah Bagi Hak Milik Perorangan Turun Temurun Atas Tanah.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 1984 tentang pembentukan Kantor Agraria Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kotamadya Yogyakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 1984 tentang pemberlakuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1984 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak milik Perorangan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1954 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Menteri dalam Negeri Nomor 590/95555/SJ tanggal 24 September Tahun 1984 yang merupakan instruksi Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 590/18895 yang di tujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi DIY.

Internet:

Jamaluddin Mahasari, *Hak-Hak Atas Tanah "Melayang" Di Indonesia*, dalam <http://www.fks-jogja.or.id>.

Sugianto Patmo, *Sejarah Kota Dan Ekonomi Perkebunan*, dalam http://www.bksnt-jogja.com/bpsnt/download/SEJARAH_KOTA-SUGIYANTO, 2007.

<http://www.indonesia.com/bernas/042003/24/UTAMA/24met1.htm>.

http://id.wikipedia.org/wik/Kota_Surakarta, 23 Juni 2007.

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4395&Itemid.